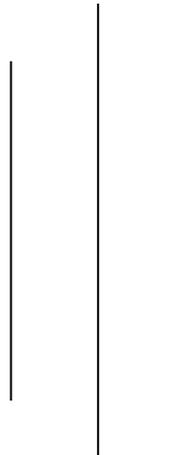




LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA PENINJAUAN
NORMALISASI SUNGAI BATANG LEMBANG DAN
FLYOVER SITINJAU LAUIK DI KABUPATEN
SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL 22 – 24 JUNI 2023**



**KOMISI V DPR RI
JAKARTA, 2023**

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------|----------|
| I. PENDAHULUAN | 3 |
| I.1. Dasar Hukum | 3 |
| I.2. Maksud dan Tujuan | 3 |
| I.3. Lokasi dan Waktu | 4 |
| I.4. Agenda Kunjungan | 4 |
| II. HASIL KUNJUNGAN | 5 |
| II.1. Temuan, Permasalahan dan Usulan | 5 |
| II.2. Kesimpulan dan Rekomendasi | 7 |
| III. PENUTUP | 7 |
| LAMPIRAN | 8 |
| Dokumentasi Kunjungan | 8 |



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA PENINJAUAN NORMALISASI SUNGAI BATANG
LEMBANG DAN FLYOVER SITINJAU LAUIK DI KABUPATEN SOLOK,
PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL 22 – 24 JUNI 2023**

=====

I. PENDAHULUAN

I.1. Dasar Hukum

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
4. Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI tanggal 16 Mei 2023.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat adalah:

- a. Untuk melihat secara langsung progres kegiatan normalisasi Sungai Batang Lembang;
- b. Untuk mengetahui dan mendengar secara langsung terkait permasalahan dan rencana pembangunan *flyover* Sitinjau Lauik;
- c. Untuk menyerap aspirasi dan usulan dari Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat atas program-program pembangunan infrastruktur dan transportasi yang bermitra dengan Komisi V DPR RI.

Tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja adalah dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (4), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, yaitu:

- butir a. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;*
- butir d. *melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.*

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa:”Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:”

- butir f *mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.*

I.3. Lokasi dan Waktu

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan normalisasi Sungai Batang Lembang dan *Flyover* Sitingau Lauik di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 tanggal 22 – 24 Juni 2023, yang dipimpin oleh **Bapak H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com (A-461/F-PPP/DAPIL SUMBAR II)**.

I.4. Agenda Kunjungan

Agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat yaitu peninjauan lapangan normalisasi Sungai Batang Lembang; pertemuan dan ramah tamah Komisi V DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten Solok beserta Kementerian PUPR; dan dilanjutkan peninjauan *flyover* Sitingau Lauik.

II. HASIL KUNJUNGAN

II.1. Temuan, Permasalahan dan Usulan

1. Normalisasi Sungai Batang Lembang

- Sungai Batang Lembang memiliki panjang 43 km yang mengalir 3 (Tiga) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yaitu: Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Solok, sehingga pengendalian banjir harus ditangani secara bersamaan baik di bagian hulu dan hilir sungai.
- Sungai Batang Lembang kerap terjadi banjir setiap hujan datang. Dari hasil studi ada 10 km yang dianggap perlu ada penanganan dalam rangka pengendalian banjir, dimana dari 10 km tersebut dibagi menjadi 9 titik.
- Dari TA. 2018 sampai dengan TA. 2022, Kementerian PUPR telah menganggarkan total Rp 45 Miliar untuk melaksanakan program pengendalian banjir di 5 Titik. Sejumlah 4 Titik berada di Kota Solok dan 1 Titik Berada di Kabupaten Solok yaitu di Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung.
- Masih ada 3 titik di Kab.Solok yang masih belum dilakukan penanganan banjir. Oleh karena itu, diharapkan kelanjutan program normalisasi dapat dituntaskan sampai 2024, sehingga permasalahan banjir di Sungai Batang Lembang dapat selesai secara tuntas.

2. Rencana Pembangunan *Flyover* Sitinjau Lauik

- Rencana pembangunan *flyover* atau jembatan layang Sitinjau Lauik dilakukan untuk mengatasi tikungan tajam di kawasan Sitinjau Lauik yang rawan kecelakaan.
- Dengan adanya *Flyover* Sitinjau Lauik, aspek geometrik jalan akan menjadi lebih baik untuk mendukung keselamatan transportasi, peningkatan aksesibilitas, serta peningkatan produktivitas.
- *Flyover* sudah diusulkan dari tahun 2019-2020, dan sudah ditinjau oleh Menteri PUPR pada tahun 2022 dan sudah menjadi isu nasional.
- Rencana pembangunan *flyover* tersebut agar dapat terealisasi, untuk itu Kementerian PUPR perlu untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, yaitu Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kota Padang.

- Hingga saat ini rencana pembangunan Flyover Sitinjau Lauik masih dalam tahap evaluasi teknis, dan readiness criteria termasuk DED tengah disiapkan.

3. Usulan Pemerintah Kabupaten Solok

1) Irigasi Banda Lawe atau Bandar Lawas

- Kabupaten Solok merupakan daerah penghasil beras, dimana menjadi salah satu daerah penopang ketahanan pangan nasional. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok mengusulkan untuk memprioritaskan Banda Lawe menjadi irigasi yang bertaraf nasional, yang bisa mengaliri lebih dari 3000 Ha.
- Komisi V DPR RI pernah menganggarkan Rp. 40 Miliar di Tahun 2011, dan secara bersamaan Provinsi juga menganggarkannya, tetapi sampai sekarang hanya sampai DED, dan sudah 11 tahun masih belum ada realisasi.
- Persatuan Kepala desa yang daerahnya dialiri sungai Banda Lawe menyampaikan bahwa Banda Lawe atau Bandar Lawas, mengairi 12 nagari (desa) di kabupaten Solok, dibangun tahun 1979 tetapi sampai sekarang belum bisa dinikmati oleh masyarakat. Memohon agar Bandar Lawas bisa dimanfaatkan dan dilanjutkan kembali. Pernah diusulkan pada waktu yang lalu, tetapi wewenang masih di provinsi. Bupati sudah menyurati agar wewenang ini dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Pusat karena lahan pertaniannya lebih dari 3.000 Ha. Kalau ini bisa dibangun dan dilaksanakan, bidang pertanian khususnya ketahanan pangan, perikanan, perkebunan serta perternakan bisa meningkat lagi.

2) Terkait Inpres tentang Jalan Daerah, terdapat 3 usulan pembangunan jalan di Kabupaten Solok, diantaranya yaitu Jalan Kapujan – Rimbo Data, dimana Kapujan merupakan daerah paling terpencil dan terisolir.

II.2. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR cq Ditjen Sumber Daya Air atas pelaksanaan program pengendalian banjir Sungai Batang Lembang di Kabupaten Solok. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk melanjutkan program pengendalian banjir Sungai Batang Lembang agar selesai secara tuntas.
2. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder, termasuk Pemerintah Kabupaten Solok dan Wali Nagari yang telah mendukung kelancaran program pengendalian banjir Sungai Batang Lembang.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR cq Ditjen Bina Marga untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait realisasi rencana pembangunan *Flyover* Sitinjau Lauik.
4. Komisi V DPR RI mendukung usulan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok yang berada dalam lingkup tugas dari Mitra Kerja komisi V DPR RI yang memberikan *output* dan *outcome* seluas-luasnya kepada masyarakat Kabupaten Solok.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan normalisasi Sungai Batang Lembang dan *Flyover* Sitinjau Lauik di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Juni 2023. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI dan dapat ditindaklanjuti mitra Komisi V DPR RI dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Solok, dan Indonesia pada umumnya.

KETUA TIM

ttd

H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com
A-461

LAMPIRAN

Dokumentasi Kunjungan

















